

MENGATASI DILEMA PERUBAHAN IKLIM: RELEVANSI *CAP-AND-TRADE* DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON INDONESIA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN *NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS* BERDASARKAN *PARIS AGREEMENT*

Oleh:

Dewi Shafarhunny Aqilla¹, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme *cap-and-trade* dalam mengatasi perubahan iklim. Penulisan hukum ini secara lanjut menganalisis relevansi pemberlakuan *cap-and-trade* dalam kebijakan perdagangan karbon pada Perpres No. 98 Tahun 2021 untuk memenuhi kewajiban *Nationally Determined Contributions* yang merupakan mandat dari *Paris Agreement* di tengah kondisi dilema perubahan iklim Indonesia.

Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada peraturan tertulis dan bahan hukum yang memerlukan data sekunder. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara kepada ahli untuk kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif.

Penulis menyimpulkan dua hal dalam penulisan hukum ini. Pertama, *cap-and-trade* merupakan kebijakan lingkungan hidup yang menggunakan instrumen ekonomi serta memberikan fleksibilitas bagi negara untuk mengatasi perubahan iklim karena dinilai mampu untuk mengendalikan jumlah emisi GRK dan membawa manfaat dari segi ekonomi. Oleh karena itu, *cap-and-trade* dapat dipertimbangkan keberlakuannya. Kedua, kondisi regulasi Indonesia telah mendukung adanya pelaksanaan *cap-and-trade* untuk memenuhi target NDC dalam rangka pemenuhan komitmennya pada *Paris Agreement*. Berdasarkan regulasi yang ada, dapat dilihat itikad baik dari Pemerintah Indonesia untuk merespon dilema perubahan iklim dengan tetap menurunkan emisi di tengah industrialisasi yang sedang digencarkan. Meski demikian, pelaksanaan *cap-and-trade* belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih membutuhkan dukungan regulasi-regulasi lainnya yang lebih teknis.

Kata Kunci: *Cap-and-Trade, Nationally Determined Contributions, Paris Agreement, Perubahan Iklim.*

¹ Mahasiswa Program Sarjana pada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***ADDRESSING THE CLIMATE CHANGE DILEMMA: THE RELEVANCE OF
CAP-AND-TRADE IN THE CARBON TRADING POLICY OF INDONESIA TO
FULFILL THE NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS' OBLIGATION
UNDER THE PARIS AGREEMENT***

By:

Dewi Shafarhunny Aqilla³, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.⁴

ABSTRACT

This legal research aims to identify and analyze the cap-and-trade mechanism in tackling climate change. Furthermore, this legal research proceeds to analyze the enforcement of cap-and-trade as part of the carbon pricing policy of Indonesia in Presidential Regulation Number 98 Year 2021 to fulfill the Nationally Determined Contributions (NDC) obligations under the Paris Agreement regime amidst the climate change dilemma in Indonesia.

This is normative research that focuses on written regulations and legal materials supported by secondary data. This research applies three approaches consisting of the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The data were collected through the literature review and expert interview. Additionally, data were analyzed using deductive reasoning.

There are two important findings in this research. First, the cap-and-trade mechanism is a part of environmental policy that uses economic instruments to reduce greenhouse gas emissions and offer economic advantages. Those characteristics support flexibility for states in combatting climate change while driving economic growth simultaneously, hence this mechanism is reasonable to be considered in climate change policy-making. Secondly, based on the existing regulations, cap-and-trade is already implemented in Indonesia to fulfill the obligations under the Paris Agreement. This shown that the Government of Indonesia exercises good faith in response to the climate change dilemma by continuing the emission reduction in the middle of industrialization. However, the release of other technical regulations is necessary to support the implementation of cap-and-trade in Indonesia.

Keywords: *Cap-and-Trade, Nationally Determined Contributions, Paris Agreement, Climate Change.*

³ Undergraduate Student at the Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer of the Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.